



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 200/ 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - b. melakukan konfirmasi konsultasi dengan pengurus Partai Politik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - c. membuat berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - d. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 200/ 24 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN  
 PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA PERSYARATAN  
 ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pembina III
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kasi Bina Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Ketua KPUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI